

Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Gresik (2017-2019)

by Alfin Maulana

Submission date: 21-Apr-2022 02:41PM (UTC+0700)

Submission ID: 1816184431

File name: Prosiding_-_alfin_maulana.pdf (2.8M)

Word count: 4973

Character count: 33501

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN GRESIK (2017-2019)

Alfin Maulana, S.EI., M.SEI.
Program Studi Ekonomi Pembangunan
Universitas Wijaya Putra Surabaya
alfinmaulana1987@yahoo.com

Abstrak

Tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan struktur yang oleh stakeholders, pimpinan menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja (Zarkasyi, 2018). Konsep *governance* secara sederhana merujuk pada, proses pembuatan keputusan dan implementasinya. Realisasi *Good corporate Governance* menjadi sangat penting karena dampaknya yang dapat mendorong terwujudnya pembangunan ekonomi daerah, yang artinya peningkatan pembangunan ekonomi daerah dimungkinkan dengan adanya *Good Governance*. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui pengaruh *good corporate governance* terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Gresik, sehingga diharapkan *good corporate governance* mampu memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah khususnya di kabupaten Gresik. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan dilihat dari persepsi para pejabat yang ada di wilayah kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan sampel dengan 100 responden dari kalangan pejabat yang berada di lingkungan kerja kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan Uji Validitas, Uji Realibilitas serta Uji Pengaruh Parsial (Uji t), sedangkan teknik analisis data menggunakan SPSS versi 21. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa *good corporate governance* memiliki pengaruh/berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Gresik

Kata kunci: *Good Corporate Governance*, pertumbuhan ekonomi

1. Pendahuluan

Kerangka otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memberikan dimensi yang lebih jelas bagi daerah untuk melaksanakan pemerintahan dan pelayanan serta pengelolaan keuangan berdasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pembangunan nasional yang bersifat inklusif mengedepankan pembangunan berdimensi kewilayahan dengan daerah sebagai pusat pertumbuhan (Toni, 2015). Dengan dimensi yang jelas tersebut, maka urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat didanai oleh APBN, sedangkan urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah daerah didanai APBD. Kebijakan pendanaan kepada daerah dalam rangka menjalankan urusan dan kewenangan yang telah dilimpahkan tersebut diikuti dengan pemberian kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah dalam rangka

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah/PAD. Pembangunan nasional akan tercapai apabila setiap sumber pendapatan daerah dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah melalui kebijaksanaankebijaksanaan didalam meningkatkan pendapatan daerah. Salah satunya melalui pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Karena dengan pemungutan pajak maka akan menambah sumber pendapatan bagi Negara terutama daerah Peningkatan nilai suatu lembaga atau organisasi dapat dicapai jika lembaga tersebut mampu beroperasi dengan mencapai tujuan yang telah yang ditargetkan. Tentunya dalam mencapai tujuan tersebut selalu akanmendapatkan hambatan-hambatan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, maka suatu organisasi atau lembaga perlu memiliki suatu sistem pengelolaan perusahaan yang baik *Good Corporate Governance* (GCG). Tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan struktur yang oleh stakeholders, pimpinan menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja (Zarkasyi, 2018). Konsep *governance* secara sederhana merujuk pada, proses pembuatan keputusan dan implementasinya. Realisasi *Good corporate Governance* menjadi sangat penting karena dampaknya yang dapat mendorong terwujudnya pembangunan ekonomi daerah, yang artinya peningkatan pembangunan ekonomi daerah dimungkinkan dengan adanya *Good Governance* (Thomas, 2006). Sektor Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Penerimaan Pajak daerah yang penting untuk mambiyai seluruh pembiayaan daerah, pembangunan daerah dan membantu kelancaran roda Pemerintahan. Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.

Perekonomian Gresik tahun 2020 yang diukur berdasarkan produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 177,17 triliun. Sementara PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp 129,14 triliun dan untuk pendapatan perkapital masyarakat Gresik tahun 2019 mencapai Rp 42,66 juta. Di atas menunjukkan grafik pertumbuhan ekonomi di Gresik pada tahun 2019-2020. Dari grafik berikut dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pada 2019- 2020, kemudian turun pada tahun 2020 (Rohmat, 2017).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian atau penelitian terkait dengan pengaruh *good corporate governance* terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Gresik (2017-2019). Yang mana penelitian ini dilakukan bertujuan untuk melihat lebih jauh mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Gresik.

2 Kajian Pustaka

2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional. Adanya perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek. Secara umum teori tentang pertumbuhan ekonomi dapat di kelompokkan menjadi dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern. Pada teori pertumbuhan ekonomi klasik, analisis di dasarkan pada kepercayaan dan efektivitas mekanisme pasar bebas. Teori ini merupakan teori yang dicetuskan oleh para ahli ekonom klasik antara lain Adam Smith, David Ricardo. Teori lain yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi adalah teori ekonomi modern.

Teori Pertumbuhan Harrod Domar (Rizka, 2021) merupakan salah satu teori pertumbuhan ekonomi modern, teori ini menekankan arti pentingnya pembentukan investasi

bagi pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi investasi maka akan semakin baik perekonomian, investasi tidak hanya memiliki pengaruh terhadap permintaan agregat tetapi juga terhadap penawaran agregat. Melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek, yaitu: proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya ada pada perubahan atau perkembangan itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya (Ahmad, dkk., 2008). Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian penyesuaian teknologi, intitusional dan ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada. Perkembangan ekonomi mengandung arti yang lebih luas serta mencakup perubahan pada susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

2.1.1 Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Prof Rahardjo Adisasmita (2017), dalam bukunya mengatakan bahwa ada beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah sebagai berikut:

1. Ketidakseimbangan Pendapatan Dalam keadaan yang ideal, di mana pendapatan dengan mutlak didistribusikan secara adil, 80 persen populasi terbawah akan menerima 80 persen dari total pendapatan, sedangkan 20 persen populasi teratas menerima 20 persen total pendapatan. Menurut Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB), susunan pengelompokan penduduk dibagi tiga, yaitu 40 persen populasi terendah, 40 persen populasi sedang, dan 20 persen populasi teratas. Indikator ketidakseimbangan pendapatan dapat diterapkan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah.
2. Perubahan Struktur Perekonomian Dalam masyarakat yang maju, pembangunan ekonomi yang dilaksanakan akan mengakibatkan perubahan struktur perekonomian, dimana terjadi kecendrungan bahwa kontribusi (peran) sektor pertanian terhadap nilai PDRB akan menurun, sedangkan kontribusi sektor industri akan meningkat. Sektor industri memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan nasional dan regional, sektor industri dapat menyediakan lapangan kerja yang luas, memberikan peningkatan pendapatan kepada masyarakat, menghasilkan devisa yang dihasilkan dari ekspor. Oleh karena itu, perekonomian suatu wilayah harus di orientasikan selain sektor pertanian, tetapi harus pula diorientasikan kepada sektor industri.
3. Pertumbuhan Kesempatan Kerja Masalah ketenagakerjaan dan kesempatan kerja merupakan salah satu masalah yang strategis dan sangat mendesak dalam pembangunan di Indonesia. Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 240 jiwa, tingkat pengangguran cukup tinggi dan cenderung bertambah luas akibat krisis financial Negara-negara di dunia. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang sangat luas

tersebut, diperlukan peranan pemerintah. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah pembangunan prasarana (misalnya jalan). Pembangunan jalan yang menjangkau ke seluruh kantong-kantong produksi, akan mendorong peningkatan produksi berbagai komoditas sektor pertanian dalam arti luas (meliputi tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan) serta barang-barang hasil industri. Pembangunan prasarana dan sarana transportasi akan menunjang berkembangnya berbagai kegiatan di sektor-sektor lainnya (pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan lainnya).

4. Tingkat dan Penyebaran Kemudahan Dalam hal ini “kemudahan” diartikan sebagai kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, baik pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (seperti sandang, pangan, papan, memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan, kesempatan melakukan ibadah, rekreasi dan sebagainya), maupun pemenuhan kebutuhan untuk dapat melakukan kegiatan usaha misalnya mendapatkan bahan baku, bahan penolong, suku cadang, listrik, air bersih, dan jasa-jasa seperti jasa angkutan, pemasaran, perbankan dan lainnya).
5. Produk Domestik Regional Bruto Salah satu konsep yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi regional (wilayah) adalah konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan ukuran prestasi (keberhasilan) ekonomi dari seluruh kegiatan ekonomi. Salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah adalah dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut definisi, PDRB adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun.

2.2 Good Corporate Governance (GCG)

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Bahasa Inggris: "*Good Corporate Governance*" atau disingkat "GCG"), adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Contoh dari penerapan *Good Corporate Governance* adalah sistem pengendalian dan pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan, tata kelola teknologi informasi, pedoman perilaku etika, dsb. Berikut teori dari beberapa ahli tentang *Good Corporate Governance* yaitu Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (Rahmi, 2014) menjelaskan bahwa *Good Corporate governance* adalah sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, *board of director*, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Menurut Fuest, (2014) dalam Fatchan dan Trisnawati, (2016) menjelaskan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham.

Perusahaan dengan *Good Corporate Governance* yang baik seharusnya memiliki mekanisme pengawasan yang lebih baik sehingga perusahaan dapat beroperasi secara lebih efisien dan akhirnya meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Sutedi, (2015) dalam Wati dan Asandimitra, (2017) menjelaskan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) dapat diartikan sebagai system yang mengatur serta mengendalikan perusahaan supaya menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholder. Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses yang memiliki hubungan antara pihak manajemen perusahaan, dan pihak lain

yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) dengan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham.

2.2.1 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut Effendi, (2016) menjelaskan bahwa ada lima prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) adalah sebagai berikut:

1. **Transparansi (*Transparency*)**
Prinsip dasar, untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk mengambil keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.
2. **Akuntabilitas (*Accountability*)**
Prinsip dasar, perusahaan dapat mempertanggungjawabkan terhadap kinerja secara wajar dan transparan. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan lain.
3. **Responsibilitas (*Responsibility*)**
Prinsip dasar, perusahaan harus dapat mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *Good Corporate Governance*.
4. **Independensi (*Independency*)**
Prinsip dasar, untuk melancarkan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. **Kesetaraan dan kewajaran (*Fairness*)** Prinsip dasar, dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas kesetaraan dan kewajaran.

2.2.2 Indikator *Good Corporate Governance* (GCG)

Beberapa indikator yang dapat untuk mengukur *Good Corporate Governance* antara lain:

1. Komisaris independen yang diukur dengan jumlah komisaris independen pada perusahaan dibandingkan dengan total komisaris yang ada pada perusahaan.
2. Kepemilikan manajerial yang diukur dengan jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen terhadap jumlah saham yang beredar.
3. Kepemilikan institusional yang diukur dengan jumlah saham yang dimiliki institusi terhadap jumlah saham yang beredar.
4. Kualitas auditor eksternal yang merupakan variabel dummy. Perusahaan dengan KAP *Big Four* diberi skor satu dan nol untuk KAP *Non Big Four*.
5. Komite audit yang diukur dengan jumlah anggota komite audit yang dimiliki suatu perusahaan.

2.3 Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten Gresik

Good Corporate Governance muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan. Atau seringkali dikenal dengan istilah masalah keagenan, permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik modal dengan manajer adalah sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak di ambil alih atau di investasikan pada proyek yang tidak menguntungkan sehingga tidak mendatangkan return, sehingga dibutuhkan *good corporate governance* untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemiliki dan manajer (Macey dan O'Hara, 2013). Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dimana pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai selama ini tidak dibangun di atas landasan yang kokoh sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat (Rifda, 2019). Kelemahan tersebut diantaranya adalah semakin terpisahnya hubungan para pemegang saham dengan manajemen, kinerja keuangan perusahaan yang kurang transparan, serta semakin tidak terkendalinya pengelolaan dan pengambilan keputusan perusahaan yang terkait dengan kelangsungan hidup perusahaan.

3. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Adapun variabel independen dalam penelitian ini *good corporate governance*. Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi di kabupaten Gresik. Penelitian ini dilakukan di lingkungan pemerintah kabupaten Gresik yang beralamatkan di jl. Dr. Wahidin Sudirohusudo, Kembangan, Kebomas, Gresik. Dalam penelitian menggunakan sampel dengan 100 responden dari kalangan pejabat yang berada di lingkungan kerja kabupaten Gresik. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan data *time series* (urutan waktu) dari tahun 2017-2019, yang mana data tersebut adalah data sekunder yang diperoleh dari lembaga pemerintah yaitu BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan BPS kabupaten Gresik. Dan data primer pada penelitian dengan menggunakan teknik kuisioner (angket) dengan menggunakan skala *likert*.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Sejak lahir dan berkembangnya kota Gresik selain berawal dari masuknya agama islam yang kemudian menyebar ke seluruh pulau jawa, tidak terlepas dari nama Nyai Ageng Pinatih, dari janda kaya raya yang juga seorang syahbandar, inilah nantinya akan kita temukan nama seseorang yang kemudian menjadi tonggak sejarah berdirinya kota gresik. Dia adalah seorang bayi asal Blambangan (Kabupaten Banyuwangi) yang dibuang ke laut oleh orang tuanya, dan ditemukan oleh para pelaut anak buah Nyai Ageng Pinatih yang kemudian diberi nama Jaka Samudra. Setelah perjaka bergelar raden paku yang kemudian menjadi penguasa pemerintah yang berpusat di Giri Kedato, dari tempat inilah beliau kemudian dikenal dengan panggilan Sunan Giri. Kalau Syeh Maulana Malik Ibrahim pada jamannya dianggap sebagai para penguasa, tiang para raja dan menteri, maka sunan giri disamping kedudukannya sebagai seorang sunan atau wali (Penyebarnya Agama Islam) juga dianggap sebagai Sultan / Prabu (Penguasa Pemerintahan) Sunan Giri dikelan menjadi salah satu tokoh wali songo ini, juga dikenal dengan prabu Satmoto atau Sultan Ainul Yaqin. Tahun dimana beliau dinobatkan sebagai penguasa pemerintahan (1487 M) akhirnya dijadikan sebagai hari lahirnya kota Gresik. Beliau memerintah gresik selama 30 tahun dan dilanjutkan oleh keturunannya sampai kurang lebih 200 tahun. Menjabat sebagai bupati yang pertama adalah Kyai Ngabehi Tumenggung

Poesponegoro pada tahun 1617 saka, yang jasadnya dimakamkan di komplek makam Poesponegoro di jalan pahlawan gresik, satu komplek dengan makam Syech Maulana Malik Ibrahim. Kota Gresik terkenal sebagai kota wali, hal ini ditandai dengan penggalan sejarah yang berkenaan dengan peranan dan keberadaan para wali yang makamnya di Kabupaten Gresik yaitu, Sunan Giri dan Syekh Maulana Malik Ibrahim.

Selain itu, kabupaten Gresik juga bisa disebut dengan Kota Santri, karena keberadaan pondok-pondok pesantren dan sekolah yang bernuansa Islami, yaitu Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah hingga Perguruan Tinggi yang cukup banyak di kota ini. Hasil Kerajinan yang bernuansa Islam juga dihasilkan oleh masyarakat Kota Gresik, misalnya kopyah, sarung, mukenah, sorban dan lain-lain. Semula kabupaten ini bernama Kabupaten Surabaya. Memasuki dilaksanakannya PP Nomer 38 Tahun 1974. Seluruh kegiatan pemerintahan mulai berangsur-angsur dipindahkan ke Gresik dan namanya kemudian berganti dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dengan pusat kegiatan di Kota Gresik. Kabupaten Gresik yang merupakan sub wilayah pengembangan bagian (SWPB) tidak terlepas dari kegiatan sub wilayah pengembangan Gerbang Kertosusila (Gresik, Bangkalan, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan). Termasuk salah satu bagian dari 9 sub wilayah pengembangan Jawa Timur yang kegiatannya diarahkan pada sektor pertanian, industri, perdagangan, maritime, pendidikan dan industri wisata. Dengan ditetapkannya Gresik sebagai bagian salah satu wilayah pengembangan Gerbang Kertosusila dan juga sebagai wilayah industri, maka kabupaten Gresik menjadi lebih terkenal dan termashur, tidak saja di persada nusantara tetapi juga ke seluruh dunia yang ditandai dengan munculnya industri multi modern yang patut dibanggakan bangsa Indonesia.

4.1.1 Visi-Misi Pemerintahan Kabupaten Gresik

Visi Pemerintahan kabupaten Gresik

Mewujudkan Gresik Baru Mandiri, Sejahtera, Berdaya saing dan berkemajuan berlandaskan Akhlakul karima.

Misi Pemerintahan kabupaten Gresik

Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung didalamnya, yaitu : Gresik Akas (Amanah, Kolaboratif, Antisipatif dan Sigap), Gresik Seger (Sejahtera, Bahagia dan Berdikari), Gresik Mapan (Maju, Pintar dan Aman), Gresik Agropolitan, Gresik Mandiri (Gema Berkarya), Gresik Cerdas, Gresik Sehat, Gresik Barokah, dan Gresik Lestari.

4.2 Deskripsi Responden

Dalam penelitian ini mengambil 100 responden yang dijadikan sampel, deskripsi karakteristik responden merupakan identitas dari masing-masing responden sebagai pegawai pemerintahan kabupaten Gresik. Dalam penelitian ini identitas responden diklasifikasikan dalam 4 hal yaitu Usia, jenis kelamin, Pendidikan terakhir, dan penghasilan. berikut ini penyajian hasil mengenai karakteristik responden pada Pemerintahan Kabupaten Gresik.

4.3 Deskripsi Variabel Pertumbuhan Ekonomi

4.1.3.1 Deskripsi Variabel P

Deskripsi V

1. Berdasarkan tabel 4.4 diatas, Indikator Y1.1 dapat dilihat bahwa Ketidakseimbangan Pendapatan Dalam keadaan yang ideal pada daerah Kabupaten Gresik memiliki rata-rata 2.9300 dengan sebaran data sebanyak 0.60728 berarti menunjukkan dapat dipertanggung jawabkan.
2. Berdasarkan tabel 4.4 diatas, Indikator Y1.2 dapat dilihat bahwa Perubahan Struktur Perekonomian Dalam masyarakat yang maju pada Kabupaten Gresik sudah mulai berubah sesuai harapan pemerintah memiliki rata-rata 2.6200 dengan sebaran data sebanyak 0.59933 berarti menunjukkan dapat dipertanggung jawabkan.
3. Berdasarkan tabel 4.4 diatas, Indikator Y1.3 dapat dilihat bahwa Pertumbuhan Kesempatan Kerja semakin mudah di Kabupaten Gresik memiliki rata-rata 2.7500 dengan sebaran data sebanyak 0.60927 berarti menunjukkan dapat dipertanggung jawabkan.
4. Berdasarkan tabel 4.4 diatas, Indikator Y1.4 dapat dilihat bahwa Tingkat dan Penyebaran Kemudahan didukung oleh pelosok pemerintahan Kabupaten Gresik memiliki rata-rata 2.8400 dengan sebaran data sebanyak 0.50692 berarti menunjukkan dapat dipertanggung jawabkan.
5. Berdasarkan tabel 4.4 diatas, Indikator Y1.5 dapat dilihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Gresik yang seimbang memiliki rata-rata 2.1100 dengan sebaran data sebanyak 0.79003 berarti menunjukkan dapat dipertanggung jawabkan.

4.4 Deskripsi Variabel *Good Governance Corporate*

Deskripsi Variabel *Good Governance Corporate*

4.1.3.2 Deskripsi Variab

Deskripsi V

1. Berdasarkan tabel 4.6 diatas, Indikator X2.1 dapat dilihat bahwa Pengeluaranataubelanjadaerah rata-rata Kabupaten Gresik Sudah Sesuai dengan Peraturan Pemerintahan yang ada memiliki rata-rata 2.6200 dengan sebaran data sebanyak 0.59933 berarti menunjukkan dapat dipertanggung jawabkan.
2. Berdasarkan tabel 4.6 diatas, Indikator X2.2 dapat dilihat bahwa Indeks penduduk Kabupaten Gresik Sudah sesuai dengan harapan masyarakat Gresik memiliki rata-rata 2.7500 dengan sebaran data sebanyak 0.60927 berarti menunjukkan dapat dipertanggung jawabkan.
3. Berdasarkan tabel 4.6 diatas, Indikator X2.3 dapat dilihat bahwa Luas Daerah Kabupaten Gresik sudah sesuai dengan peraturan pemerintahan Pusat memiliki rata-rata 2.7200 dengan sebaran data sebanyak 0.60436 berarti menunjukkan dapat dipertanggung jawabkan
4. Berdasarkan tabel 4.6 diatas, Indikator X2.4 dapat dilihat bahwa Indeks harga bangunan yang ada di Kabupaten Gresik sangat tinggi sekali memiliki rata-rata 2.7500 dengan sebaran data sebanyak 0.60927 berarti menunjukkan dapat dipertanggung jawabkan
5. Berdasarkan tabel 4.7 diatas, Indikator X2.5 dapat dilihat bahwa Indeks kemiskinan relatif yang ada di Kabupaten Gresik sangat bervariasi memiliki rata-rata 3.1400 dengan sebaran data sebanyak 0.60336 berarti menunjukkan dapat dipertanggung jawabkan.

4.5 Hasil Analisis Data

4.5.1 Uji Validitas Variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah pernyataan-pernyataan dalam kuesioner layak atau sah untuk digunakan sebagai instrument penelitian. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan SPSS versi 21 for windows, dengan sampel yang digunakan sebesar 100 responden pada masing-masing indikator ditiap variabelnya. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan nilai positif, maka pernyataan atau indikator dinyatakan valid (Ghozali, 2017:78). Pada tampilan output dari variabel Pertumbuhan Ekonomi pada tabel 4.10 terlihat bahwa korelasi antar masing-masing indikator terhadap jumlah skor variabel menunjukkan hasil yang signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pernyataan adalah valid.

pernyataan adalah valid.

Hasil Uji Validi

Y1.1	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
Y1.2	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
Y1.3	Pearson Correlation

Keterangan :

1. Pada indikator pertama Komisaris independen yang diukur dengan jumlah komisaris independen pada pemerintahan dibandingkan dengan total komisaris yang ada pada perusahaan dapat dipertanggung jawabkan yang dapat dilihat bahwa nilai r hitung sebesar $0,575 >$ dari $r_{tabel} 0,195$ maka dinyatakan valid.
2. Pada indikator Kedua Kepemilikan manajerial yang diukur dengan jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen pemerintahan terhadap jumlah saham yang beredar sudah sesuai dengan harapan masyarakat yang dapat dilihat bahwa nilai r hitung sebesar $0,513 >$ dari $r_{tabel} 0,195$ maka dinyatakan valid.
3. Pada indikator Ketiga Kepemilikan institusional yang diukur dengan jumlah saham yang dimiliki institusi terhadap jumlah saham yang beredar sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah yang dapat dilihat bahwa nilai r hitung sebesar $0,543 >$ dari $r_{tabel} 0,195$ maka dinyatakan valid.
4. Pada indikator Keempat Kualitas auditor eksternal yang merupakan variabel dummy Pemerintahan Kabupaten Gresik dengan KAP Big Four diberi skor satu dan nol untuk KAP Non Big Four sesuai dengan peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan yang sudah ditetapkan pemerintah yang dapat dilihat bahwa nilai r hitung sebesar $0,643 >$ dari $r_{tabel} 0,195$ maka dinyatakan valid.
5. Pada indikator Kelima Komite audit yang diukur dengan jumlah anggota komite audit dipemerintahan Kabupaten Gresik yang dimiliki suatu ketetapan secara paten yang dapat dilihat bahwa nilai r hitung sebesar $0,521 >$ dari $r_{tabel} 0,195$ maka dinyatakan valid.

4.6 Uji Realibilitas

Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha $> 0,60$ (Ghozali, 2017:74). Pada tampilan tabel dibawah ini menunjukkan nilai-nilai cronbachs alpha untuk variabel *Good Corporate Governance* (X) dan Pertumbuhan Ekonomi (Y).

4.6.1 Uji Realibilitas Pertumbuhan Ekonomi (Y)

4.1.5.1 Uji Realibilitas

Uji R

F

Pada tampilan gambar tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk variabel Pertumbuhan Perekonomian menunjukkan nilai $0,424 > 0,60$. Maka hal ini berarti data tersebut reliabel.

4.6.2 Uji Realibilitas *Good Corporate Governance*

Uji Realibilitas *Good Corporate Governance* (X)

Pada tampilan gambar tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk variabel *Good Corporate Governance* menunjukkan nilai $0,448 > 0,60$. Maka hal ini berarti data tersebut reliabel.

4.7 Uji Pengaruh Parsial (Uji t)

Uji t yaitu suatu uji untuk mengetahui signifikan pengaruh variabel bebas (*Good Corporate Governance*) secara parsial atau individual menerangkan variabel terikat (Pertumbuhan Ekonomi).

Dari hasil Uji Validitas di atas, dapat diketahui bahwa Pengujian hipotesis secara parsial untuk variabel X (*Good Corporate Governance*) dapat memberikan kontribusi yang baik dalam meningkatkan Y (Pertumbuhan Ekonomi), dalam pengujian hipotesis secara parsial untuk variabel X (*Good Corporate Governance*) mempunyai nilai signifikan sebesar 0,005 dengan taraf signifikan $0,005 < 0,05$ berarti *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan secara parsial pada Pertumbuhan Ekonomi.

4.6 Pembahasan

Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Gresik. Pengujian hipotesis secara parsial untuk variabel X (*Good Corporate Governance*) dapat memberikan kontribusi yang baik dalam meningkatkan Y (Pertumbuhan Ekonomi), dalam pengujian hipotesis secara parsial untuk variabel X (*Good Corporate Governance*) mempunyai nilai signifikan sebesar 0,005 dengan taraf signifikan $0,005 < 0,05$ berarti *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan secara parsial pada Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian ini didukung oleh Anggita lukitasari prahayuninggar (2019), mengatakan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh *good governance* terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan data panel 10 negara ASEAN dalam periode tahun 2002-2017. *Good Governance* diukur melalui indikator yang terdiri dari aspirasi dan akuntabilitas, stabilitas politik dan kurangnya kekerasan, efektivitas pemerintahan, kualitas regulasi, aturan hukum, dan kontrol korupsi. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Generalized Method of Moments* (GMM). Hasil penelitian ini menunjukkan aspirasi dan akuntabilitas, kualitas regulasi, aturan hukum, dan kontrol korupsi signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sedangkan stabilitas politik dan kurangnya kekerasan serta efektivitas pemerintahan tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian di atas dapatlah diambil sebuah kesimpulan, bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (aspirasi dan akuntabilitas, kualitas regulasi, aturan hukum, dan kontrol korupsi) memiliki peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi di sebuah daerah, khususnya kabupaten Gresik. Yang mana *Good Corporate Governance* dalam pengujian secara parsial melalui uji hipotesis mempunyai nilai signifikan sebesar 0,005 dengan taraf signifikan $0,005 < 0,05$, hal ini berarti *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan secara parsial pada Pertumbuhan Ekonomi. Oleh karenanya, diharapkan bagi pengelola

pemerintah kabupaten Gresik khususnya mampu menerapkan atau mengelola *good corporate governance* dengan baik, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya mampu mensejahterkan masyarakatnya.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. 2015. *Pertumbuhan Ekonomi Wilayah*.
- Afifah, Rifda. 2019. *Harmonisasi Prinsip Hukum Tanggung Jawab Sosial-Lingkungan Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*.
- Ahmad Ma'ruf dan Latri Wihastuti, "Perumbuhan Ekonomi Indonesia", Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 9, Nomor 1, April 2008
- Aulia, Rizka. 2021. *Pengaruh Pertumbuhan UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Ponorogo Periode 2013-2017*. Diss. IAIN Ponorogo,
- Effendi, Ricardo Billyadajaya. "Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan PT Pim Pharmaceuticals." *Agora* 4.1 (2016): 720-728.
- Fadhilah, Rahmi. 2014. "Pengaruh *good corporate governance* terhadap *tax avoidance* (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2009-2011)." *Jurnal akuntansi* 2.1.
- Fatchan, Ilham Nuryana, and Rina Trisnawati. 2016. *Pengaruh Corporate Governance Pada Hubungan Sustainability Report Dan Nilai Perusahaan (Studi Empiris Perusahaan Go Public di Indonesia Periode 2013-2014)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Macey, Jonathan R., and Maureen O'Hara. 2016. "Vertical and Horizontal Problems in Financial Regulation and Corporate Governance." *The Future Of Large, Internationally Active Banks* 55: 371.
- Solim, Rahmat. 2017. *Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Alokasi Dana Transfer Terhadap Pertumbuhan PDRB Di Era Desentralisasi Fiskal Tahun 2011-2015 (Studi Kasus 38 Kabupaten/Kota Di Jawa Timur)*. Diss. Universitas Brawijaya.
- Thomas S. Kaihatu. 2006. *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. 8(1), 1-9
- Toni, Hernan. 2015. *Kebijakan Otonomi Daerah dan Keadilan Dalam Mewujudkan Good Governance*. *Jurnal TAPIS*. Volume 7 No. 12. Jauari-Juni 2015.
- Zarkasyi, W. 2018. *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*. Alfabeta.
- Wati, Lutviana. "PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP NILAIPERUSAHAAN DENGAN VARIABEL INTERVENING KINERJA KEUANGAN (STUDI PADA SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI)." *Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)* 5.3 (2017).

Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Gresik (2017-2019)

ORIGINALITY REPORT

27%

SIMILARITY INDEX

29%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

26%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

123dok.com

Internet Source

10%

2

repository.ub.ac.id

Internet Source

10%

3

id.123dok.com

Internet Source

4%

4

digilib.unila.ac.id

Internet Source

3%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 3%